Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu

Property Rights Theory in Terms of Malay Customary Land Rights

Rafiqi*, Arie Kartika & Marsella

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: rafiki.mkn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji dan mengetahui teori hak milik hak atas tanah Adat Melayu. Pengakuan hukum adat diakui di Indonesia diatur dalam Undang-undang 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Tujuan penelitian untuk mengetahui sejarah hak atas tanah Melayu dan teori yang menentukan hak milik atas Tanah Adat Melayu. Sejarah hak atas tanah berawal dari kerajaan Aru dan kedatangan perkebunan asing wilayah Sumatera Timur. Teori hak milik berkaitan dengan hak atas tanah menggunakan pendapat Teori Mcpherson dan Teori Jhon Locke bahwa tanah berasal dari Tuhan dan manusia harus bekerja keras.

Kata Kunci: Teori Hak Milik; Hak Atas Tanah; Melayu.

Abstract

This research was made to study and find out the theory of property rights on Malay customary land rights. The recognition of customary law is recognized in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. The research method used is normative juridical law research through a historical approach and a conceptual approach. The aim of the research is to know the history of Malay land rights and the theory that determines the Property Rights on Malay Customary Land. The history of land rights begins with the Aru kingdom and the arrival of foreign plantations in the East Sumatra region. Property rights theory relating to land rights uses the opinion of Theoi Mcpherson and John Locke's theory that land comes from God and humans must work hard.

Keywords: Property Rights Theory; Land Rights; Malay.

How to Cite: Rafiqi, Kartika, A. & Marsella. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, Desember 2021. 14 (2): 71-76.

PENDAHULUAN

Sejarah adalah kuburan, begitu kata Vilfredo Pareto, seorang insinyur yang sekaligus seorang ekonom dan juga sosiolog. Tanpa sejarah kita tidak akan pernah ada, sejarah berlanjut bersama berlangsungnya kehidupan (Wiryani, 2018).

Ruang Lingkup agraria merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi dari aspek yuridis yang disebut hak, sedangkan yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah (Nugroho & et.al, 2017).

Sebelum Negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan/ketatanegaraan yang bersifat monarki, dimana secara *de facto* eksistensi kerajaan dan kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk lebih khusus lagi tentang penerapan hukum adat, hak keperdataan, serta hak-hak penguasaan dan pengelolaan atau perolehan hak kepemilikan atas tanah.

Van Vollenhoven memberikan *statement* tentang adanya suatu kepastian hak terhadap masyarakat hukum adat dengan menuliskan (Setiady, 2008) bahwa di seluruh kepulauan Indonesia ini hak ulayat (*beschikking Recht*) merupakan hak tertinggi terhadap tanah (*het hoogste recht ten aanzien van grond*). Hak tertinggi atas tanah artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak juga hak-hak seperti yang diatur dalam UUPA Nomor 5 tahun 1960. Penjelmaan secara umum hak ulayat antara lain dapat diuraikan sebagai berikut (Nugroho & et.al, 2017). Persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya berhak mengerjakan tanah hutan.

- a. Orang asing hanya bisa, jika mendapat izin dari persekutuan hukum yang

bersangkutan dan harus membayar bunga hutan (*recognitie*).

- b. Sesuatu yang tunduk pada hak ulayat tidak dapat secara abadi diserahkan.
- c. Meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan, campur tangan persekutuan.

Wilayah kekuasaan sultan-sultan dan pemerintahan datuk-datuk di Sumatera Timur, secara keseluruhan adalah merupakan wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat Melayu Sumatera Timur.

Solly Lubis mengatakan penetapan teori tergantung pada masalah (*problem*) yang sedang diteliti. Penelitian hukum sendiri tentunya harus melihat sebuah masalah melalui sudut pandang (*point of view*) disiplin ilmu hukum. Inilah yang menyebabkan langkah pertama dalam penelitian hukum, harus dilakukan dengan menempatkan suatu masalah hukum dalam tataran paling atas dengan predikat negara hukum (Solly Lubis). Secara ilmiah, fungsi teori adalah menyediakan suatu alat analisis yang penting untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban yang bersifat tentatif. Teori ini memungkinkan dibangunnya suatu paradigma (Suarjiyo, 2008), yang memberikan koherensi dan konsistensi bagi segala perdebatan mengenai hak dan menyumbangkan suatu model dapat dipakai untuk mengukur hak-hak yang diandaikan itu. Teori juga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan dengan tepat batas hak-hak yang eksistensinya telah disepakati (Davidson, 1994).

Dari Latar Belakang penulisan ini, maka ditarik rumusan masalah bagaimana sejarah Tanah Adat Melayu di Sumatera Timur dan bagaimana teori hak milik tentang hak atas tanah di Sumatera Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*) menggunakan melalui pendekatan sejarah dan pendekatan konsep (Sunggono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hak Atas Tanah Melayu di Sumatera Timur

Sultan Mahmud Perkasa Alam, pertama kali memberikan tanah secara konsesi kepada Belanda untuk membuka kebun tembakau (Admansyah, 1989), yang dimulai oleh Jacobus Nienheyus pada tahun 1863 di Kampung Martubung (Gani, 2019).

Sebelum adanya perkebunan asing, masyarakat pada waktu bebas untuk membuat, mengusahakan tanah karena tanah terbentang luas. Perusahaan Perkebunan Tembakau Tanah Deli mulai dibanjiri oleh penduduk dari berbagai daerah sekitarnya, bahkan orang-orang dari tanah Jawa mulai masuk untuk bekerja di Perkebunan Tembakau Deli tersebut. Keberhasilan kebun tembakau di daerah ini mengundang peminat-peminat untuk menanam getah, cokelat, kelapa sawit, teh, kopi dan lain sebagainya. Kampung-kampung kecil dan letaknya strategis karena perkebunan berubah menjadi kampung besar, dengan sendirinya dibangun jalan yang menghubungkan kampung dengan tanah perkebunan dibangun oleh rakyat kemudian dibangun oleh pemerintahan Belanda, hal ini disampaikan oleh Tarmizi (Perret, 2010). Munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan, menimbulkan gejolak pada masyarakat Melayu dan terjadi perlawanan yang dikenal dengan perang Sunggal (Harian Waspada, 2004). Pemicu terjadinya "Perang Sunggal" adalah masalah tanah. Pada tahun 1870 Sultan Mahmud Perkasa Alam (Sultan Deli) memberikan tanah yang subur di wilayah Sunggal untuk dijadikan konsesi perkebunan perusahaan Belanda yang bernama De Rotterdam dan *Deli Maschapij*. Pemberian tanah ini tanpa melalui perundingan dengan penguasa serta rakyat wilayah Sunggal sehingga timbullah

perlawanan. Hak ulayat atas tanah rakyat dikonsesikan oleh Sultan kepada perusahaan perkebunan, sehingga perkampungan sangat berguna bagi rakyat untuk mengambil kayunya, hasil-hasil hutan berburu akibat tanah-tanah tersebut dibuat areal perkebunan tidak ada lagi. Sebelum berdirinya Kesultanan Deli masyarakat meminta izin kepada Kepala-kepala Urung (XII Kota, Serbanyaman, Sukapiring dan Sanembah Deli) (Mahadi, 1976).

Perkembangan Agraria di periode Kolonial tidak terlepas dari perkembangan perkebunan di Sumatera Timur. Pada tanggal 7 Juli 1863 Jacobus Nienheyus dari Firma *Van den Arend Syrabaya* mendarat di muara Sungai Deli di Labuhan. Melalui pendekatan personal yang dilakukan oleh Siad Abdullah kepada Sultan Deli. Jacobus Nienhuys berhasil mendapatkan konsesi seluas 4.00 bau (1 bau = 10,67 hektare) ditepian Sungai Deli, dengan jangka waktu konsesi 20 tahun.

Pemberian hak dan konsesi Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Deli sebagai jaminan kepemilikan lahan, sebagai alas hak untuk menanamkan modal dan mendapatkan dan perbankan di sektor perkebunan serta legimitasi untuk investasi jangka panjang. Sejak diberlakukan *Agarische Wet* pada tahun 1870, mengizinkan perusahaan swasta memperoleh konsesi jangka panjang, perkebunan tembakau Sumatera Timur tumbuh dengan cepat. Konsesi merupakan izin dari pemerintah, yang pada umumnya disertai dengan syarat-syarat dan batas waktu yang ditentukan.

Perusahaan Perkebunan Tembakau Tanah Deli mulai dibanjiri oleh penduduk dari berbagai daerah sekitarnya, bahkan orang-orang dari tanah Jawa bahkan orang-orang dari tanah Jawa mulai masuk untuk bekerja di Perkebunan Tembakau Deli tersebut. Keberhasilan kebun tembakau di daerah ini mengundang peminat-peminat untuk menanam getah, cokelat, kelapa sawit, teh, kopi dan lain sebagainya. Kampung-kampung kecil dan letaknya strategis karena perkebunan berubah menjadi kampung besar, dengan sendirinya dibangun jalan yang

menghubungkan kampung dengan tanah perkebunan dibangun oleh rakyat kemudian dibangun oleh pemerintahan Belanda.

Munculnya perusahaan-perusahaan perkebunan, menimbulkan gejolak pada masyarakat Melayu dan terjadi perlawanan yang dikenal dengan perang Sunggal. Pemicu terjadinya “Perang Sunggal” adalah masalah tanah. Pada tahun 1870 Sultan Mahmud Perkasa Alam (Sultan Deli) memberikan tanah yang subur di wilayah Sunggal untuk dijadikan konsesi perkebunan perusahaan Belanda yang bernama De Rotterdam dan *Deli Maschappij*. Pemberian tanah ini tanpa melalui perundingan dengan penguasa serta rakyat wilayah Sunggal sehingga timbulah perlawanan. Hak ulayat atas tanah rakyat dikonsesikan oleh Sultan kepada perusahaan perkebunan, sehingga perkampungan sangat berguna bagi rakyat untuk mengambil kayunya, hasil-hasil hutan berburu akibat tanah-tanah tersebut dibuat areal perkebunan tidak ada lagi.

Pembagian wewenang antara penguasa tertinggi dengan Rajamuda menimbulkan pengaruh yang kurang serasi. Pemerintah Eropa (Belanda) berusaha menyederhanakan susunan pemerintah tersebut, terutama penghapusan kedudukan Rajamuda. Di Deli kedudukan Raja Muda dihapuskan setelah wafatnya Rajamuda terakhir (sekitar 1888). Saat ini keberadaan Rajamuda dimunculkan kembali karena Sultan belum mampu memangku jabatannya.

Terdapat 4 (empat) jenis *Grant* yang berlaku di Sumatera Bagian Timur, yaitu:

1. *Grant Controleur (Grant C)*, yaitu *grant* yang diberikan Sultan kepada orang yang tunduk kepada KUHPerduta dan orang Indonesia yang *Gouvernement*, yang mana hak ini dapat dikonversi menjadi hak pakai.
2. *Grant Deli Maatschappij (Grant D)*, yaitu pemerintahan Swapraja memberikan ke *Deli Mij* untuk 99 tahun lamanya tanah yang terletak antara Sei Deli dan Si Percut dari Mabar sampai Deli Tua yang disebut kontrak Mabar-Deli Tua. *Grant* yang

diberikan Sultan kepada bangsa asing, yang mana terhadap konversi *grant* ini tidak terdapat ketentuan yang mengaturnya, namun menurut Boedi Harsono dapat dikonversi menjadi hak pakai karena sifatnya sama dengan *Grant Controleur (Grant C)*.

3. *Grant Sultan*, yaitu *grant* yang diberikan Sultan kepada kaulanya, yang mana merupakan perwujudan tentang penentuan hak-hak pribumi atas tanah. Hak ini dapat dikonversikan menjadi Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan, sesuai dengan subjek hak dan peruntukannya.
4. *Concessie-Pertanian (Landbouwcensessie)*, yaitu suatu hak sewa menyewa dengan syarat-syarat. Tanah-tanah lahan perkebunan itu disewa oleh pihak perkebunan dari Sultan/Kepala Masyarakat Adat di Sumatera Timur ketika itu tertuang dalam akta konsesi. Sultan/kepala masyarakat hukum adat menyewakan tanah selama tenggang waktu 75 atau 99 tahun dan ia bertindak untuk dan atas nama masyarakat hukum adat yang diketahui oleh Gubernur Jendral (Saidin & dkk, 2006).

Jika kita kilas balik kebelakang kira-kira pada tahun 1890, Datuk dan disetujui Sultan mengeluarkan surat keterangan penyerahan tanah kepada seseorang. Jadi sebidang tanah diserahkan sebagai suatu pemberian atau disebut “kurnia” tetapi pada kenyataannya, tanah tersebut sudah lama digunakan dan ditempati, sedangkan permintaan *Grant* Sultan baru diajukan bila yang bersangkutan berniat menjual tanah tersebut (Mahadi, 1976).

Teori Hak Milik Tanah Adat Melayu

Konsep Hak Milik atas Tanah Hak milik merupakan hak yang memberikan wewenang dan kebebasan kepada pemegangnya untuk melakukan segala sesuatu menjadi objek pemilikannya asalkan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Disamping hak milik bersifat turun menurun tanpa batas waktu

(Halim, 1987). Pengertian milik tidak pernah tetap dari waktu ke waktu pranata serta pandangan orang selalu berubah dan karena itu juga arti yang diberikan pada kata milik. Manusia mempunyai suatu hak atas kelangsungan hidup, makanan dan minuman dan barang-barang yang lain disediakan oleh alam untuk mempertahankan hidupnya maupun wahyu. Tuhan memberikan dunia kepada adam turunannya, maka tidak mungkin Raja Universal mempunyai hak milik atas dasar pemikiran, bahwa Tuhan memberikan dunia kepada Adam dan para pewarisnya secara bergantian dengan mengecualikan semua keturunannya yang lain. Tuhan telah memberikan dunia kepada manusia secara keseluruhan telah memberikan kepada mereka penalaran agar digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan hidup dan demi kenyamanan. Bumi dan benua yang ada di dalamnya diberikan kepada manusia untuk jaminan dan kenyamanan hidup. Sebelum terjadi pemilikan tanah, orang yang mengumpulkan sebanyak mungkin buah-buah liar, membunuh, menangkap dan menjinakkan binatang sebanyak mungkin, orang yang menggunakan jerih payahnya untuk memperoleh hasil alam yang spontan atau bekerja untuk merubahnya dari kedudukan yang diberikan oleh alam. Apapun yang digarap dan dituai, ditimbun dan digunakan oleh seseorang, sebelum barang menjadi rusak merupakan haknya menjadi miliknya (Macpherson, 1978).

Jika seseorang menciptakan sesuatu maka ia memilikinya sebagai ganjaran atas apa yang telah dikerjakannya (Sodiki, 1994).

Gagasan keliru, sebagaimana bahwa milik adalah barang. Pemikiran terhadap milik pribadi (yaitu yang bersifat eksklusif) sudah ada sejak teori paling awal, tetapi indentifikasi milik dengan milik pribadi baru mulai muncul beberapa waktu sebelum abad ke-17, teori milik, hanya untuk milik pribadi, yang menyebabkan pertentangan. Milik pribadi secara modern sungguh mengalami pembatasan tertentu dalam penggunaannya dan pembatasan yang dapat disebutkan bahwa hukum secara umum melarang

penggunaan barang milik. Tuhan memberikan dunia kepada manusia secara keseluruhan, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka demi kepentingan dan kenyamanan mereka. Tuhan memberikan kepada orang-orang yang rajin tidak kepada orang-orang yang serakah. Tuhan memerintahkan dan kehendaknya memaksa manusia untuk bekerja. Hak milik tidak dapat dirampas setelah dimiliki.

Salah satu ciri khas di dalam tubuh adat Melayu di Sumatera Timur tentang tanah ialah sifat terbuka, sifat demokratis dan nasional terhadap kedatangan suku-suku lain. Sesuai dengan pepatah “patah rantingnya, minum airnya” (setiap orang yang sudah memilih kewajiban sesuatu negeri ia berhak akan mengenyam keuntungan). Jika Raja memandang semua tanah adalah kepunyaannya, namun pada kenyataannya sebelum kedatangan perkebunan asing, rakyat bebas membuka hutan, berladang secara berpindah-pindah, mengambil kayu di hutan untuk berbagai macam keperluan. Setelah datang perkebunan asing, maka terbuka kesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan, Surat Kampung dan *Grant* Datuk. Faktor Raja, menambahkan penjelmaan hak ulayat (Mahadi, 1976). Pemilik tanah bukan Sultan, Sultan hanya menguasai, yang menjadi pemilik tanah adalah rakyat. Sultan menguasai tanah berdasarkan pendelegasian oleh rakyat. Selain Sultan yang menguasai tanah adalah Kepala Urung (Datuk) dan Penghulu kampung. Tanah yang diberi izin, harus dikerjakan terus menerus. Kalau tanah ditelantarkan, maka tanah kembali ke Sultan, jangka waktu 3 (tiga) tahun, atau sudah hilang tanda patoknya (TM. Lahusny).

Kesultanan mempunyai hak dan kebebasan memberikan atau menyerahkan tanah kepada rakyat maupun mengikat perjanjian. Sultan berfungsi sebagai kepala pemerintah, Kepala Urusan Agama dan kepala Adat Melayu. Dalam menjalankan tugasnya Sultan dibantu oleh Raja Muda, Orang-orang besar dan pembantu yang lainnya. Kekuasaan Raja/Sultan terhadap tanah pada periode kolonialisme sebelum Tahun 1870 pada umumnya berdasarkan sistem feodalisme

yaitu Raja/Sultan adalah pemilik tanah dalam Kerajaan/Kesultannya. Rakyat adalah juga milik raja yang dapat digunakan untuk melaksanakan kepentingannya dan menjaga kehormatannya. Di Kesultanan berlaku semua tanah-tanah dan berwenang mengaruniakannya kepada kerabat dan aparat birokrasi maupun kepada rakyat.

Sultan Deli berkedudukan juga sebagai pemangku/Kepala Masyarakat Hukum/Persekutuan Hukum Adat Deli, Persekutuan hukum menempati tempat sentral, karena pada dasarnya hak atas tanah ulayat/hak atas tanah komunal dipegang oleh persekutuan hukum dan transaksi mengenai tanah dilakukan oleh Kepala Persekutuan.

SIMPULAN

Sejarah hak atas tanah berawal dari kerajaan Aru dan kedatangan perkebunan asing wilayah Sumatera Timur. Teori Hak Milik berkaitan dengan hak atas tanah menggunakan pendapat Teori Macpherson dan Teori Jhon Locke bahwa tanah berasal dari Tuhan dan manusia harus bekerja Keras. Jika Raja memandang semua tanah adalah kepunyaannya, namun pada kenyataannya sebelum kedatangan perkebunan asing, rakyat mengambil kayu di hutan untuk berbagai macam keperluan, bebas membuka hutan, beladang secara berpindah-pindah, Setelah datang perkebunan asing, maka terbuka kesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan, Surat Kampung dan *Grant* Datuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Admansyah, T. (1989). *Butir-butir Sejarah Suku Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Karya Budaya Nasional.
- Davidson, S. (1994). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Grafiti.
- Gani, M. A. (2019). *Jejak Planters di Tanah Deli, Dinamika Perkebunan Sumatera Timur 1863-1996*. Bogor: IPB Press.
- Halim, R. (1987). *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Macpherson. (1978). *Pemikiran Dasar tentang Hak Milik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Mahadi. (1976). *Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975)*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, S. S., & et.al. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Kafilah Publishing.
- Perret, D. (2010). *Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Saidin, O., & dkk. (2006). *Konflik Penguasaan Hak atas Tanah Eks Konsesi Kesultana Deli, Kumpulan Tulisan Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Timur)*. Medan: Chaya Ilmu.
- Setiady, T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sodiki, A. (1994). *Penataan Kepemilikan Hak atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang*. Malang: Program Pasca Sarjana Unair.
- Suarjiyo. (2008). *Filsafat ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wiryani, F. (2018). *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Kolonial hingga Kemerdekaan*. Malang: Setara Press.

Perundang-undangan

- Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Website

- Waspada online 2004, diseminarkan pada 27 Juni 2004 diseminarkan atas Kerjasama Lembaga Pengembangan dan pembinaan Kebudayaan Masyarakat Sumatera Utara (Legenda Sutra)